

SKRIPSI

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KEJAHATAN BEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA
PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana*

Oleh:

UNIVERSITAS ANDALAS

MUHAMMAD FAJRI

1910115003

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

**Prof. Ismansyah, S.H., M.H
Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 13/PK-IV/III/2024

ABSTRAK

Sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya, penting untuk memastikan keamanan lalu lintas adalah keamanan yang mencakup keamanan manusia, kendaraan, jalan maupun lingkungan. Namun tidak jarang hak tersebut dirampas oleh oknum tidak bertanggung jawab membuat masyarakat merasa tidak aman dalam berkendara serta maraknya pembegalan dengan tujuan mengambil harta benda korban yang melintas di jalan raya telah menjadi masalah serius. Upaya penegakan hukum memiliki peranan penting dalam menekan kasus-kasus pencurian sebab dengan adanya penegakan hukum yang baik maka akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga tidak terjadi lagi kasus yang berulang. Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara pada bidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban pada masyarakat menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Pentingnya peran kepolisian dalam meningkatkan kewaspadaan dan fungsi keamanan serta patroli terhadap tindak pidana begal harus ditingkatkan. Namun, dalam penerapannya Kepolisian belum bisa menjalankan fungsi keamanan serta ketertiban pada masyarakat dengan maksimal karena menghadapi berbagai kendala, belum memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan angka kriminalitas, dan masih lemahnya penegakan hukum. Adapun rumusan masalah yang penulis bahas yaitu, 1. Bagaimakah peranan pihak kepolisiandalam penegakan hukum terhadap kejahatan begal, terkait penyelesaian tindak pidana kejahatan begal di wilayah hukum Polresta Padang. 2, Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh pihak Polresta Padang dalam penegakan hukum terhadap kejahatan begal yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang 3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Padang dalam mengatasi kendala pada penegakan hukum terhadap kejahatan begal yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dengan hasil penelitian penulis yaitu upaya preventif yang dilakukan kepolisian adalah melakukan patroli dan Razia dan upaya represif yang dilakukan kepolisian adalah penindakan secara tegas terhadap pelaku. Kendala yang dialami pihak kepolisian adalah jauhnya jarak kejadian peristiwa begal tersebut dan kurangnya personal anggota kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan begal, sehingga untuk merespon laporan atau temuan adanya kegiatan pencurian, perampasan dan pengancaman di jalan raya menjadi terbatas. Upaya yang dilakukan kepolisian yaitu meningkatkan keamanan di jalan-jalan yang kemungkinan besar terjadinya aksi begal dengan melakukan patroli, pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat dan pemasangan peringatan akan maraknya pembegalan.

Kata Kunci: Begal, Penegakan Hukum, Kepolisian, Kejahatan